

PERILAKU POLITIK SANTRI PADA PEMILU LEGISLATIF 2014

M. Hanif Thohari

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya

thoharihanif@gmail.com

M. Jacky

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya

jackyflinders@gmail.com

Abstrak

Kaum santri memiliki catatan sejarah cukup panjang dan dinamis dalam dinamika politik nasional. Terutama setiap kali penyelenggaraan pemilihan umum, santri sering menjadi fenomena unik dan menarik dalam menggalang suara. Tulisan ini meneliti bagaimana strategi dan perilaku santri yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (politisi santri) dalam mencari dukungan suara pada pemilihan umum legislatif pada tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Subjek penelitian ini adalah calon anggota legislatif pada pemilu 2014 yang tergolong santri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Penelitian ini memperlihatkan perilaku politik santri pada pemilu legislatif 2014 yang cenderung beragam, dengan pendekatan tindakan sosial yang berbeda yaitu tindakan rasional instrumental dan tindakan tradisional. Tindakan rasional instrumental bisa dilihat pada perilaku politisi santri yang misalnya pada penggunaan baliho tanpa terlalu menampilkan simbol-simbol dan bahasa agamis. Sedangkan tindakan tradisional merupakan tindakan yang tidak rasional. Tindakan tradisional ini misalnya dilakukan politisi santri yang menggunakan bahasa-bahasa atau simbol agamis saat melakukan kampanye politik.

Kata Kunci : Perilaku politik, Santri, Pemilu.

Abstract

Moslem students have a very long history and dynamic in national politics. In every national election, Moslem students often a unique and interesting phenomenon in collecting vote. This writings investigate how is Moslem student's strategy and behavior who nominates themselves as legislative candidate (Moslem student politician) in looking for vote supporter in legislative election in 2014. The method used in this study was qualitative with phenomenology approach. The location of this research is in Surabaya city and Sidoarjo district, East Java. The subject of this research is legislative candidate in national election 2014 which belong to Moslem student. The data collection technique used two ways, primary and secondary. The data was analyzed by describing with Max Weber social behavior theory. This research found that politic behavior of Moslem student in legislative election 2014 was variety with different social approach. They are rational behavior instrumental and traditional behavior. Rational behavior instrumental can be seen from Moslem student politician's behavior such as the using of ballyhoo without showing too much symbols and religious language. While, traditional behavior is irrational behavior. This traditional behavior such as did by Moslem student politician which use too much symbols and religious language in their campaign.

Keywords : Politic behavior, Moslem student, Election.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sebagai negara demokrasi, sejak tahun 1955 Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum atau yang biasa disingkat pemilu. Pemilu diselenggarakan dengan maksud memilih pemerintah negara berdasarkan keinginan atau suara rakyat, sesuai dengan slogan asas negara itu sendiri yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia cukup panjang dan dinamis, mulai dari pemilu yang hanya diikuti oleh tiga partai politik (parpol) sampai pemilu yang diikuti empat puluh delapan parpol, mulai dari pemilu yang hanya memilih parpol saja hingga pemilu yang memilih langsung calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif. Namun dinamisasi tersebut tidak akan merubah pola, bahwa setiap pemilu, suara rakyat terus diperebutkan secara “membabi-butu” atau dengan kata lain diperebutkan dengan segala cara, baik etis maupun tidak etis.

Indonesia adalah Negara yang meyakini agama sebagai hak asasi warganya. Keberpengaruh agama terhadap proses berbangsa dan bernegara cukup kental, hingga pada proses pemilu pun agama tetap menjadi faktor yang mampu mempengaruhi hasil pemilu. Sejarah perolehan suara pemilu dari partai-partai yang berbasis agama terutama islam cukup signifikan. Mulai dari partai Masyumi yang merupakan partai islam yang kala itu menjadi salah satu partai yang cukup besar, hingga partai NU, PPP, dan berbagai partai islam atau berbasis islam pada era reformasi, ini membuktikan bahwa keterlibatan agama pada proses penyelenggaraan negara khususnya pemilu tidak bisa dinisbikan.

Partai-partai berbasis agama khususnya islam bahkan pernah mencapai puncaknya pada pemilu tahun 1999 membawa Abdurrahman Wahid yang notabene adalah tokoh agama atau santri yang cukup berpengaruh sebagai Presiden RI ke-4 melalui koalisi poros tengah. Ini sekali lagi membuktikan bahwa agama mempunyai peranan signifikan dalam proses penyelenggaraan negara yang dalam hal ini adalah pemilu. Namun seiring dengan proses berjalannya demokratisasi dalam pemilu, fenomena ini berubah. Pada pemilu 2004 dan 2009 partai-partai berbasis islam tidak mampu meraup perolehan suara sebesar pemilu-pemilu sebelumnya, ini berbanding terbalik jika dikaitkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas adalah beragama islam. Artinya bisa jadi agama bukan lagi menjadi faktor utama sebagian besar pemilih dalam menentukan pilihannya dalam pemilu.

Mobilitas politik santri mulai memasuki golongan politik secara historis dan ideologis, berbeda

bahkan bertentangan. Kriteria santri tidak hanya terbatas pada hubungan dengan salah satu golongan politik, akan tetapi secara luas berhubungan dengan semua golongan politik. Politik santri melalui partai islam ternyata tidak mendapatkan dukungan dari pemeluk Islam sesuai dengan jumlahnya yang mayoritas. Hal ini menarik jika dihubungkan dengan konsep dan cita-cita perjuangan islam golongan santri yang ternyata tidak memperoleh dukungan mayoritas pemeluk islam sendiri, sebagian diantara elit santri justru memberikan dukungan kepada partai non Islam (Mulkhan, 1994:8).

Penulis juga berasumsi bahwa banyak faktor yang kemudian mempengaruhi mengapa pengaruh agama pada pemilu akhir-akhir ini menjadi kurang signifikan. Terutama melihat proses demokratisasi negara yang terus berjalan, dan tentunya proses pendewasaan demokrasi politik juga bertambah tinggi, boleh dibilang proses kedewasaan politik inilah yang kemudian menjadi faktor utama melemahnya pengaruh fanatisme agama terhadap perolehan suara partai-partai berbasis agama. Demokrasi lambat laun telah membuka keran kebebasan warga untuk turut serta secara aktif dalam proses penyelenggaraan negara, terutama dalam hal keterbukaan dan transparansi publik. Akibatnya masyarakat dapat mengetahui apa saja yang dilakukan pemerintah, dan akhirnya masyarakat mampu memberikan penilaian sendiri terhadap kinerja pemerintah yang dihasilkan dari pemilu.

Namun seperti yang telah disinggung diatas, seiring berjalannya demokratisasi yang semakin maju, masyarakat agaknya mengalami perubahan signifikan dalam urusan politik. Pengetahuan masyarakat tentang politik semakin bertambah, Masyarakat sudah semakin “melek politik”, masyarakat sudah cukup pintar dalam menentukan pilihan politiknya. Adanya ruang akses keterbukaan publik yang cukup besar, serta transparansi kinerja pemerintah yang sudah mulai sedikit terbuka, masyarakat sedikit banyak menjadi tahu bagaimana sebenarnya wajah dan rupa aktor politik yang bermain di sekitar pemerintahan. Sehingga jika hanya menggunakan simbol, citra iklan, atau janji kampanye belaka maka tidak bisa lagi menjamin dapat dengan mudah mempengaruhi pilihan masyarakat. Simbol agama atau *dawuh* kiyai, citra iklan dengan gambar elitis atau *alitis*, atau janji dengan deretan kata yang menggiurkan, sepertinya tidak bisa lagi menjadi alat yang kuat untuk mempengaruhi pilihan masyarakat yang sudah “melek politik”.

Lantas jika demikian, bagaimana perilaku atau strategi politik santri dalam pemilu?, Karena tidak bisa dipungkiri bahwa dalam setiap gerak politik bangsa, kalangan agama atau santri sedikit banyak tetap ambil bagian di dalamnya. Banyak kalangan santri yang ikut berpartisipasi dalam pemilu sebagai calon anggota

legislatif (caleg). Namun jika dalam pemilu-pemilu sebelumnya, partai berbasis islam pernah meraup suara yang cukup besar hanya dengan daya tarik simbol agama, maka bagaimana dengan pemilu tahun 2014 dengan kondisi masyarakat yang sudah mulai *melek* politik ini?. Dengan senjata ampuh "*dawuh* kiyai" seperti yang disinggung di atas sudah merapuh, seharusnya tentu akan ada perubahan strategi dan pola senjata yang lain yang bisa menarik simpatik suara masyarakat dalam pemilu. Atau mungkin bisa jadi juga pola politik santri akan cukup sama dengan pola yang biasa dipakai kalangan nonsantri dalam pemilu.

Tulisan ini hendak melihat bagaimana perilaku politik santri pada pemilu legislatif 2014. Agar lebih dimengerti dan sebelum masuk pada ranah pengkajian lebih jauh, berikut akan sedikit menguraikan apa yang dimaksud dengan beberapa konsep yang hendak dilihat tadi. Konsep-konsep tersebut mencakup perilaku, politik santri dan pemilu 2014. Hal demikian perlu diuraikan terlebih dahulu pada tulisan ini agar lebih spesifik dan tepat sasaran, mengingat luasnya pandangan pengertian pada banyak kajian terdahulu.

Perilaku bisa juga disebut dengan tindakan yang dilakukan seseorang dengan maksud tertentu. Pengertian tersebut dengan demikian dalam kaitannya dengan tulisan ini, bisa pula dipahami dengan perilaku atau tindakan atau strategi yang dilakukan seseorang (politisi santri) untuk mencapai tujuan tertentu (menarik suara).

Politik Santri adalah sebutan bagi kegiatan politik yang dilakukan aktivis politik dari komunitas yang selama ini dikenal lebih taat terhadap berbagai aturan dalam sistem ajaran islam. Mereka sering mengklaim mewakili suara mayoritas rakyat atas argumen mayoritas rakyat itu memeluk agama islam. Namun demikian beberapa fakta politik menunjukkan bahwa partai kaum santri itu ternyata hampir selalu gagal merebut simpati mayoritas pemilih di sepanjang pemilu yang pernah diselenggarakan (Mulkhan, 2005:xi).

Kegagalan kaum santri dan capresnya memperoleh dukungan mayoritas, bukan karena partai itu buruk, calegnya busuk, atau capresnya tidak bersih dan tidak intelektual. Kegagalan tersebut lebih disebabkan karena kaum santri gagal menerjemahkan ajaran islam dan berbagai simbolnya ke dalam agenda dan program fungsional bagi kepentingan praktis mayoritas rakyat yang disosialisasikan sesuai bahasa dan logika rakyat. Islam seringkali ditampilkan dalam bahasa elite yang normatif yang tidak sesuai dengan keseharian hidup mayoritas rakyat dan sulit dipahami oleh logika rakyat kelas bawah.

Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik

tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik.

Tujuan untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya pada pemilu pada akhirnya membawa para pencari suara atau politisi terlihat menggejala masuk pada setiap ruang sosial. Pemilu yang merupakan dimensi politik dalam arti sempit seperti mengharuskan untuk dirinya masuk dan bermain peran ke dalam dimensi sosial-budaya. Demi kepentingan memperoleh suara rakyat, para politisi rela berbuat apa saja dengan berbagai macam perilaku atau strategi yang mana dengan itu suara rakyat dapat ditarik. Tidak cukup hanya dengan alat peraga kampanye semisal baliho, stiker, iklan media massa cetak maupun elektronik, lebih dalam perilaku politisi telah menjamah dimensi-dimensi sosial yang sewajarnya dimensi tersebut bebas dari kepentingan politik praktis. Dimensi-dimensi tersebut menarik untuk dimasuki para politisi karena mungkin diyakini akan bisa menarik suara signifikan karena bisa menggait masyarakat pada segmen tertentu, seperti pengajian pada segmen agamis, transportasi pada segmen pengendara atau penumpang, perlombaan mancing pada mereka yang hobi memancing, dan lain-lain.

KAJIAN TEORI

Menurut Max Weber sebuah tindakan manusia dapat berubah makna menjadi sebuah bentuk tindakan yang bermakna sosial manakala tindakan itu ditujukan pada orang lain. Tindakan yang bermakna sosial itu dalam bahasa yang lebih khusus oleh Max Weber disebutnya sebagai tindakan sosial.

Tindakan sosial bagi Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain (Ritzer, 1992:50). Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial. Tindakan sosial merupakan tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain. Tindakan sosial dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subjektif yang

mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu.

Terdapat lima ciri pokok yang menurut Weber termasuk sebagai tindakan sosial, yaitu: (1) jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata, (2) tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya, (3) tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atas suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak mana pun, (4) tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu, dan (5) tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu. Selain kelima ciri pokok tersebut, menurut Weber tindakan sosial dapat pula dibedakan dari sudut waktu sehingga ada tindakan yang diarahkan kepada waktu sekarang, waktu lalu, atau waktu yang akan datang. Sasaran suatu tindakan sosial bisa individu tetapi juga bisa kelompok atau sekumpulan orang.

Lebih lanjut Max Weber juga membedakan tindakan sosial menjadi empat kelompok (tipe), yaitu tindakan rasional instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afeksi. Tindakan rasional instrumental dilakukan seseorang dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapai. Misalnya agar dapat segera lulus kuliah dan bekerja, Indra memutuskan untuk mengerjakan skripsi daripada bermain. Tindakan rasional berorientasi nilai bersifat rasional dan memperhitungkan manfaatnya, tetapi tujuan yang hendak dicapai tidak terlalu dipentingkan oleh si pelaku. Pelaku hanya beranggapan bahwa yang paling penting tindakan itu termasuk dalam kriteria baik dan benar menurut ukuran dan penilaian masyarakat di sekitarnya. Misalnya menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Tindakan tradisional merupakan tindakan yang tidak rasional. Seseorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tanpa menyadari alasannya atau membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan. Misalnya berbagai upacara adat yang terdapat di masyarakat. Tindakan afektif sebagian besar dikuasai oleh perasaan atau emosi tanpa pertimbangan-pertimbangan akal budi. Seringkali tindakan ini dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh. Jadi dapat dikatakan sebagai reaksi spontan atas suatu peristiwa. Contohnya tindakan melompat-lompat karena kegirangan, menangis karena orang tuanya meninggal dunia, dan sebagainya.

Apa yang dirumuskan Weber tentang tindakan sosial tersebut, memberi pengecualian pada tindakan seperti menanam bunga untuk kesenangan pribadi bukan merupakan tindakan sosial, tetapi menanam bunga untuk diikutsertakan dalam sebuah lomba sehingga mendapat perhatian orang lain, merupakan tindakan sosial. Tindakan Sosial ala Weber disini adalah tindakan yang melibatkan orang lain, yaitu merupakan tindakan sosial atau sebagai tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain (Johnson dan Lawang, 1988:31).

Selain beberapa konsep tersebut, perbedaan Weber mengenai sistem otoritas mungkin bisa juga dimasukkan di sini. Sistem otoritas berkaitan dengan sistem rasio yang berkembang pada masyarakat, yang mencakup sistem otoritas tradisional, karismatik dan rasional-legal. Menurut Weber sistem otoritas rasional-legal hanya dapat berkembang dalam masyarakat barat modern. Sedangkan pada masyarakat yang cenderung berkembang lebih didominasi oleh sistem otoritas tradisional atau karismatik yang umumnya menjadi perintang berkembangnya sistem hukum rasional dan birokrasi modern. Atau dengan kata lain, sistem otoritas tradisional berasal dari sistem kepercayaan di zaman kuno, misalnya seorang pemimpin yang berkuasa karena garis keturunan keluarga atau sukunya selalu merupakan pemimpin kelompok. Agak mirip dengan tradisional, sistem otoritas karismatik mendapatkan otoritasnya dari kemampuan atau ciri-ciri luar biasa, atau mungkin dari keyakinan pihak pengikut bahwa pemimpin itu memang mempunyai ciri-ciri seperti itu. Meski demikian, Weber mempunyai keyakinan bahwa kedua otoritas yang disebut terakhir akan bisa berkembang menjadi rasional-legal seiring perkembangan waktu dan pengetahuan (Ritzer dan Goodman, 2004:37-39).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah proses yang menyelidiki tentang fenomena-fenomena sosial dan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan subyek, dan melakukan studi pada situasi yang dialami. (Kasiram, 2008:62) metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Landasan pokok pada pendekatan kualitatif pada penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi merupakan pandangan berfikir yang menekankan pada fokus kepada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi manusia.

Penelitian dalam pendekatan fenomenologi berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu yang mempunyai ide, budaya dan nilai. Fenomenologi ini dipengaruhi oleh Alfred Schutz yang menekankan adanya hubungan antara pengetahuan dengan perilaku manusia sehari-hari. Tindakan manusia didasarkan karena adanya *"because motive"* (motif sebab) kata kuncinya "karena" dan *"in order to motive"* (motif tujuan yang di capai) kata kuncinya "agar".

Teknik analisis data menurut Patton adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Fenomenologi yang digunakan adalah fenomenologi Alfred Schutz, yang menyatakan bahwa fenomenologi merupakan cara seseorang individu atau kelompok untuk memahami kesadaran dan tindakan dari individu atau kelompok tersebut. Tindakan-tindakan subjektif para aktor, tidak muncul begitu saja melainkan melalui suatu proses yang cukup panjang untuk dievaluasi dengan selalu mempertimbangkan kondisi, sosial, ekonomi, budaya, norma-norma sosial, etika sosial, maupun agama atas dasar tingkat kemampuan sendiri sebelum tindakan itu dilakukan (Idrus, 2007: 32).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum masuk pada analisis inti dalam penelitian ini, terlebih dahulu penulis sajikan pengantar yang berguna dalam melakukan analisis lebih detail mengenai masalah dalam karya ini. seperti yang telah dipaparkan pada awal bab, penelitian ini mengambil masalah bagaimana perilaku politik santri pada pemilu legislatif 2014. Secara terminologis, rumusan masalah tersebut berada dalam konteks yang lebih besar, yang setidaknya menyangkut beberapa aspek, pertama yakni melihat keterkaitan santri dan politik dalam konteks indonesia. Kedua yaitu terkait dinamisasi politik santri, dan yang ketiga menyangkut gambaran santri dalam konteks politik kontemporer.

Membahas santri dalam kaitannya dengan politik di indonesia, bisa ditelusuri secara kelembagaan dimulai pada munculnya organisasi islam yang bernama Serikat Dagang Islam (SDI) pada awal abad 20 atau lebih tepatnya pada tahun 1909 di Bogor (Yudi Latif, 2005). Meskipun semangat berdirinya SDI pada awalnya adalah semangat ekonomi, yakni sebagai perhimpunan pedagang atau pengusaha muslim agar mampu bersaing dengan pengusaha nonmuslim, baik itu Tionghoa, India, maupun barat. Namun pada perkembangannya perhimpunan tersebut efektif juga sebagai alat dalam melakukan gerakan perlawanan terhadap penjajah.

Setelah SDI, muncul selanjutnya adalah Muhammadiyah kemudian Nahdlatul Ulama' (NU). Meskipun organisasi-organisasi ini bukan lembaga atau

partai politik, namun secara politis gerakan santri di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh organisasi-organisasi tersebut. Beranjak pada masa kemerdekaan, pada tahun 1945 lahir Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) sebagai partai politik islam pertama. Berdirinya masyumi inilah yang kemudian mengawali kiprah politik kaum santri pada masa awal kemerdekaan hingga sekarang (Madinier, 2013:55). Selanjutnya pada masa-masa kepemimpinan nasional pascamerdeka, kiprah politik islam atau santri terus mengalami perkembangan. Orde lama dengan masyumi, NU, dan beberapa partai islam yang lain. Orde baru dengan Partai Persatuan Pembangunan, dan pada reformasi ada PPP, PBB, PKB, PKS, PAN dan lain-lain.

Pola politik santri dari tahun ke tahun terus mengalami dinamika, ini bisa dilihat sejak berdirinya SDI hingga partai politik modern islam sekarang. Mengamati dinamika politik santri, bisa dilihat dengan membaca sejarah politik di indonesia. Mulai dari bagaimana kelompok islam membangun kekuatan politiknya dari masa lalu hingga sekarang, serta membaca bagaimana pola-pola kecenderungan perilaku politik islam dari masa ke masa.

Masa pascareformasi memberikan ruang yang cukup besar bagi semua kalangan dalam mengekspresikan politik masing-masing termasuk kaum santri. Demokrasi yang terbuka lebar seperti telah membebaskan hampir semua kalangan untuk dapat melakukan kegiatan dan ekspresi politik apapun, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Kondisi seperti ini membuat setiap pola politik menjadi samar, termasuk politik yang dilakukan para santri. Meskipun idealnya terdapat pembeda partai-partai islam dan partai nasionalis atau nonislam, namun pada kenyataannya kaum islam taat yang berkecimpung di dunia politik tidak serta merta masuk pada partai islam. Mereka banyak masuk juga pada yang notabene bukan partai islam, begitupun secara perilaku politik mereka tidak bisa dikelompokkan hanya dengan satu pola yang "agamis". Karena seperti yang disinggung sebelumnya, iklim demokrasi dewasa ini telah memberikan ruang yang terbuka lebar untuk bisa dimainkan secara leluasa dan tidak terbatas.

Perspektif Tindakan Sosial Max Weber

Sebuah tindakan manusia menurut Weber dapat berubah makna menjadi sebuah bentuk tindakan yang bermakna sosial manakala tindakan itu ditujukan pada orang lain. Tindakan yang bermakna sosial itu dalam bahasa yang lebih khusus oleh Max Weber disebutnya sebagai tindakan sosial. Tindakan sosial bagi Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan

kepada tindakan orang lain (Ritzer, 1992:57). Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial. Tindakan sosial merupakan tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain. Tindakan sosial dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu.

Perilaku politik santri adalah bentuk tindakan dimana ada perilaku yang sengaja ditampilkan atau ditunjukkan berkaitan dengan kepentingan politik. karenanya dalam melihat perilaku tersebut menggunakan teori tindakan sosial Weber penulis rasa cukup tepat. Penggunaan teori tersebut juga berkenaan dengan permasalahan yang diambil dalam penelitian ini yaitu menyangkut pola perilaku yang dilakukan santri (atau kalau dalam terminologi Geertz adalah orang yang derajat ketaatannya terhadap agama lebih tinggi) dalam kaitannya dengan kepentingan politik atau pemilu. Artinya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para politisi santri yang menjadi subjek penelitian akan dilihat dan dikaji dengan menggunakan pendekatan teori tindakan sosial Max Weber.

Perilaku politik santri dalam penelitian ini dilihat dengan pendekatan teori tindakan sosial seperti misalnya pada fenomena pemasangan iklan baliho atau spanduk sebagai salah satu alat peraga kampanye calon anggota legislatif (caleg) yang dimaksudkan untuk menarik simpati massa dalam memilih caleg tersebut. Perilaku demikian dalam perspektif tindakan sosial merupakan bentuk tindakan yang mempunyai makna subjektif yang ditujukan atau diarahkan kepada orang lain. Lebih rinci, pemasangan baliho kampanye pada contoh tersebut adalah termasuk tindakan yang dilakukan oleh individu atau seseorang dengan tujuan agar pemasangan baliho tersebut mampu mempengaruhi pilihan orang lain dalam menentukan pilihannya atau dengan kata lain menarik simpati orang lain yang melihat baliho tersebut dalam pemilihan anggota legislatif.

Hasil temuan data menunjukkan beberapa perilaku politik yang dilakukan subjek penelitian berkenaan dengan pola kampanye dalam pemilu legislatif 2014, yaitu *pertama*, penggunaan baliho, spanduk, pamflet dan stiker. *Kedua* adalah kampanye blusukan, menghadiri forum-forum atau pengajian. *Ketiga* adalah dengan pengorganisasian tim kampanye secara solid dan memanfaatkan jaringan sosial yang dimiliki caleg.

Secara umum perilaku atau pola-pola kampanye yang disebutkan diatas tidak jauh berbeda dengan pola kampanye sebagian besar caleg, namun yang

membedakannya adalah pada wilayah teknis dan jenis pendekatan yang dipakai politisi santri dalam kampanye tersebut. Jika sering kali telah disinggung bahwa secara historis banyak ditemukan pola kampanye yang dilakukan kalangan santri dalam urusan politik adalah lekat dengan penggunaan simbol-simbol agama atau memanfaatkan fanatisme keagamaan sebagai alat penggaib massa, maka dalam konteks penelitian ini akan dilihat kembali bagaimana pola perilaku politik santri secara mutakhir.

Perilaku Pemasangan Baliho, Spanduk, Pamflet dan Stiker

Penyelenggaraan pemilihan umum banyak disebut oleh para pegamat sebagai pesta demokrasi, selain karena semua warga dapat menyalurkan hak-hak politiknya secara langsung, juga mungkin karena akan terlihat banyaknya spanduk, baliho, pamflet, stiker maupun bendera partai politik pada sepanjang jalan atau tempat-tempat umum strategis yang menjadi lahan kampanye. Sehingga semarak penyelenggaraan pemilihan umum layaknya semarak pesta demokrasi. Banyaknya baliho dan semacamnya tersebut lazim digunakan oleh partai politik dan para politisi untuk menarik simpati massa.

Baliho kampanye atau semacamnya secara sederhana adalah alat peraga kampanye yang digunakan untuk menarik simpati atau dukungan massa. Dalam bentuknya, baliho kampanye dan semacamnya ini memiliki jenis dan desain yang beragam, biasanya bergantung dengan kesesuaian konteks, segmen dan harapan pemilik alat peraga tersebut. Misalnya jika pada waktu pemasangan baliho tersebut bertepatan dengan bulan puasa, maka kebanyakan bentuk isi atau materi baliho adalah tentang ucapan selamat menunaikan ibadah puasa atau pesan-pesan yang bersifat religius. Atau misalnya lagi jika lokasi pemasangan baliho tersebut adalah bertepatan pada wilayah yang kebanyakan masyarakatnya bersifat heterogen urban, maka biasanya isi baliho bersifat umum. Selain itu ada juga baliho yang bentuk isi dan materi tidak harus disesuaikan dengan segmen atau semacamnya, tetapi memang sengaja didesain berdasarkan citra individu atau partai politik yang dibangun. Berdasarkan hasil temuan data di lapangan, keseluruhan subjek penelitian menggunakan baliho dan semacamnya sebagai alat peraga kampanye. Namun demikian bentuk dan jenis alat peraga tersebut terdapat perbedaan, baik isi materi, jenis, dan intensitasnya.

Berdasarkan pola kampanye dalam media baliho atau semacamnya, perilaku ini termasuk dalam bentuk tindakan sosial. Dimana subjek dengan sengaja memasang baliho atau semacamnya dengan tujuan menarik perhatian atau simpati publik atau masyarakat

pemilih. Perilaku tersebut juga memiliki makna subjektif yang diarahkan pada orang lain.

Perilaku pemasangan baliho atau semcamnya, juga memiliki implikasi rasional. Seperti apa yang dikemukakan Weber dalam konsepnya tentang sistem otoritas. Weber mengungkapkan bahwa sistem otoritas berkaitan dengan sistem rasio yang berkembang pada masyarakat, yang mencakup sistem otoritas tradisional, karismatik dan rasional-legal. Menurut Weber sistem otoritas rasional-legal hanya dapat berkembang dalam masyarakat barat modern. Sedangkan pada masyarakat yang cenderung berkembang lebih didominasi oleh sistem otoritas tradisional atau karismatik yang umumnya menjadi perintang berkembangnya sistem hukum rasional dan birokrasi modern. Atau dengan kata lain, sistem otoritas tradisional berasal dari sistem kepercayaan di zaman kuno, misalnya seorang pemimpin yang berkuasa karena garis keturunan keluarga atau sukunya selalu merupakan pemimpin kelompok. Agak mirip dengan tradisional, sistem otoritas karismatik mendapatkan otoritasnya dari kemampuan atau ciri-ciri luar biasa, atau mungkin dari keyakinan pihak pengikut bahwa pemimpin itu memang mempunyai ciri-ciri seperti itu. Meski demikian, Weber mempunyai keyakinan bahwa kedua otoritas yang disebut terakhir akan bisa berkembang menjadi rasional-legal seiring perkembangan waktu dan pengetahuan (Ritzer dan Goodman, 2004:37-39).

Sedangkan dalam perilaku yang dilakukan subjek dalam hal ini beragam yakni masuk dalam kategori sistem otoritas rasional, tradisional dan karismatik. Karena isi daripada baliho atau semcamnya yang digunakan subjek ada yang sarat dengan simbol-simbol agama dan ketokohan seseorang, dan ada juga yang tidak menggunakan simbol demikian. Dengan kata lain, subjek ada yang masih memasukkan dan memanfaatkan unsur-unsur keagamaan dan ketokohan seseorang, dan ada juga yang tidak memasukkan unsur-unsur tersebut dalam menarik atau memberikan perlakuan terhadap publik.

Strategi Kampanye Blusukan, Menghadiri Forum-Forum atau Pengajian

Model kampanye blusukan adalah perilaku atau tindakan dimana calon atau subjek melakukan kegiatan turun lapangan dalam rangka menarik simpati massa. Kegiatan ini beragam bentuknya, bisa dilakukan dengan gaya seperti inspeksi mendadak, bisa dengan bentuk silaturahmi ke rumah warga-warga yang berada di daerah pemilihan yang strategis dan mampu memunculkan simpati massa, atau bisa dengan menghadiri kegiatan-kegiatan warga macam kerja bakti dan ikut berpartisipasi di dalamnya.

Selain model kampanye blusukan, yang termasuk dalam kategori ini adalah model kampanye dengan

menghadiri forum-forum warga atau pengajian. Kegiatan ini adalah kegiatan di mana seorang caleg menghadiri acara pertemuan warga, misalnya acara peringatan hari besar nasional, peringatan hari besar islam, sosialisasi ataupun acara-acara pengajian warga. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengambil hati warga, menarik simpati massa pada pemilihan umum nantinya.

Perilaku seluruh subjek dalam hal ini bisa disebut dengan tindakan sosial. Tindakan atau perilaku subjek sengaja diarahkan untuk orang lain. subjek melakukan aktivitas-aktivitas tindakan yang diarahkan pada orang lain baik dengan kunjungan atau silaturahmi ke pesantren, melakukan ceramah pada pengajian-pengajian, menghadiri kegiatan warga atau sekedar membaur dalam acara-acara tertentu. Tindakan ini juga tergolong sebagai tindakan rasional instrumental, dimana subjek melakukan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menarik simpati masyarakat. Sedangkan jika dikaitkan dengan sistem otoritas Weber, perilaku-perilaku yang dilakukan subjek masuk dalam kategori sistem otoritas rasional, karismatik dan tradisional. Sistem otoritas ini ditunjukkan subjek dengan pola-pola perilaku yang banyak diarahkan dengan memakai pendekatan agamis dan fanatisme golongan, ketokohan seseorang dan juga pendekatan yang rasional.

Strategi pemanfaatan Jaringan Sosial Dan Tim Sukses

Pemilihan umum legislatif, agar dapat menang seorang calon akan berusaha semaksimal mungkin mendapatkan simpati massa pemilih. Karena dengan adanya simpati dari massa pemilih, kecenderungan yang besar akan menempatkan caleg yang mendapat simpati tersebut memperoleh suara banyak. Atau dengan kata lain tanpa simpati, suara tidak akan didapat. Untuk itu, usaha maksimal akan dikerahkan caleg demi mendapat simpati atau suara rakyat, termasuk dengan cara memanfaatkan jaringan sosial yang dimiliki atau dengan membentuk dan mengorganisasikan tim sukses secara solid.

Pemilihan umum sifatnya adalah masif, melibatkan semua orang yang berada pada usia 17 tahun ke atas dan tidak terkecuali. Semua orang memiliki suara untuk disalurkan pada pemilihan umum. Karenanya, caleg siapa yang mempunyai jaringan sosial lebih besar dan mampu memanfaatkannya dia akan menang.

Jaringan sosial merupakan sistem rangkaian hubungan seseorang dengan seseorang lainnya, baik hubungan dekat ataupun jauh. Setiap orang lazimnya pasti mempunyai jaringan sosial karena tidak luput dari yang namanya interaksi sosial. Hanya saja intensifitas dalam melakukan interaksi sosial setiap orang berbeda-beda, ada yang hanya dengan sekali interaksi saja bisa langsung akrab, ada yang perlu berkali-kali interaksi baru

bisa akrab, atau ada yang berkali-kali melakukan interaksi tapi tanpa mau mengakrabkan diri. Itu sebabnya jaringan sosial setiap orang tidak sama.

Pemanfaatan jaringan sosial dalam konteks ini dimaksudkan untuk menarik simpati dan suara massa pemilih. Seperti yang telah disinggung, bahwa pemilihan umum adalah melibatkan suara semua orang, dan perebutan suara banyak orang adalah menjadi hal yang utama dalam pemilihan umum. Karena itu bagi siapa saja yang memiliki kenalan atau jaringan sosial lebih banyak, dia memiliki kesempatan yang lebih besar juga untuk memenangkan pemilihan umum. Artinya, dengan modal jaringan sosial, seorang caleg akan dengan lebih mudah mengenalkan dan membangun kepercayaan terhadap dirinya sebagai calon anggota legislatif yang layak dipilih.

Perilaku politik dalam hal ini, bisa disebut dengan tindakan sosial. Tindakan atau perilaku subjek sengaja diarahkan untuk orang lain. subjek melakukan aktivitas-aktivitas tindakan yang diarahkan pada orang lain dengan menemui dan meminta dukungan kepada orang-orang yang dikenalnya. Tindakan yang dilakukan juga tergolong sebagai tindakan rasional instrumental, dimana subjek melakukan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menarik simpati masyarakat. Sedangkan jika dikaitkan dengan sistem otoritas Weber, perilaku yang dilakukan subjek tersebut masuk dalam kategori sistem otoritas rasional dan karismatik-tradisional. Sistem otoritas rasional ditunjukkan dengan pola-pola perilaku yang sederhana dan logis, di mana subjek cukup melakukan komunikasi dengan orang lain tanpa menekankan pada simbol-simbol agama atau ketokohan, akan tetapi lebih pada komunikasi, bertukar pikiran secara rasional. Sedangkan yang bersifat karismatik-tradisional dilakukan dengan perilaku seperti berkunjung atau silaturahmi memohon restu dan dukungan kepada para tokoh agama terutama di pesantren.

PENUTUP

Simpulan

Perilaku politik santri pada pemilu legislatif 2014 cenderung beragam, dalam arti tidak semua politisi santri menggunakan pola-pola perilaku dan strategi politik yang agamis, atau otoritas tradisional-karismatik dalam konsep Max Weber. Pada pemilu ini simbol-simbol agama tidak terlalu menjadi prioritas politisi santri dalam menggait massa. Justru perilaku yang lebih rasional dan umum menjadi satu hal yang cenderung banyak dilakukan.

Secara umum, paling tidak ada tiga kategori pola perilaku politik ataupun strategi yang dilakukan politisi santri, yaitu pertama penggunaan baliho dan

semacamnya, kedua kampanye blusukan, menghadiri forum atau pengajian, ketiga pemanfaatan jaringan sosial dan tim sukses. Ketiga kategori tersebut kesemuanya dilakukan subjek pada penelitian ini, namun dengan pendekatan tindakan sosial yang berbeda yaitu tindakan rasional instrumental dan tindakan tradisional.

Tindakan rasional instrumental adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapai. Tindakan ini bisa dilihat pada perilaku politisi santri yang misalnya pada penggunaan baliho tanpa terlalu menampilkan simbol-simbol dan bahasa agamis. Sedangkan tindakan tradisional merupakan tindakan yang tidak rasional. Politisi santri melakukan tindakan atau perilaku hanya karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, hanya mengandalkan fanatisme agama atau golongan, tanpa menyadari bahwa tujuan dan cara yang harusnya digunakan adalah menyangkut kepentingan umum, bukan hanya fokus pada sisi agamis atau golongan saja. Tindakan tradisional ini misalnya dilakukan politisi santri yang menggunakan bahasa-bahasa atau simbol agamis saat melakukan kampanye politik.

Saran

Dapat diambil pokok yang perlu dicermati dari perilaku politik santri pada pemilu legislatif 2014. Perilaku politik santri meskipun masih beragam namun cenderung lebih rasional, tidak lagi terlalu menggunakan pendekatan fanatisme agama dalam menggait massa. Pengalaman politik, dalam hal ini adalah pemilihan umum, yang telah berulang kali diselenggarakan agaknya membawa perubahan dalam berpolitik yang lebih rasional.

Para pelaku politik aktif, terutama politisi santri, harus lebih memahami kondisi kecerdasan politik dan perkembangan masyarakat. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan fanatisme agama atau golongan, namun harus lebih rasional dan kreatif. Karena masyarakat terus mengalami perkembangan, dan juga hakikatnya seorang politisi adalah membawa kepentingan umum serta aktor yang banyak mempengaruhi maju mundurnya bangsa dan negara.

Kelemahan dan kekurangan pasti tidak luput dalam penulisan karya ini, oleh karena itu diharapkan dari berbagai pihak untuk memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini, agar kedepan laporan ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Yogyakarta: UII

Yusuf, Slamet Effendy. 1983. *Dinamika Kaum Santri*. Jakarta: CV. Rajawali.

Johnson, Doyle Paul, dan Lawang, Robert M.Z. 1988. *Teori Sosiologi : Klasik dan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia.

Kasiram. Moh.2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press.

Latif, Yudi. 2005. *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslis Indonesia Abad ke-20*. Bandung: Mizan.

Maliki, Zainuddin. 2010. *Sosiologi Politik, Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mulkhan, Abdul Munir. 1994. *Runtuhnya Mitos Politik Santri*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Remy Madinier. 2013. *Partai Masjumi*. Jakarta: Mizan.

Ritzer, George, dan Goodman, Douglas J. 2010. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.

Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Terjemahan Alimandan. Jakarta: Rajawali.

Rush, Michael, dan Althoff, Phillip. 2002. *Pengantar Sosiologi Politik*. Terjemahan Kartini Kartono. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tanthowi, Pramono U. *Kebangkitan Politik Kaum Santri*. 2005. Jakarta: PSAP.

